

PERGESERAN PERAN TUAN GURU DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL DI NUSA TENGGARA BARAT

Lavica Anky Riswanda¹

Article history: Received: 18 June 2022, Revisi: 27 June 2022, Published: 29 June 2022

Abstract: This paper reveals the fact that *Tuan Guru* in the new order era did what Joel Migdal called a social and political exchange network. Where political support for Golkar was exchanged for interests with expanding influence through da'wah throughout Lombok which was used to reduce the hegemony of Wetu Telu Islam. In the Reformation era, there was a shift in *Tuan Guru's* role from a political mobilizer to a political actor by filling political positions in both executive and legislative positions. *Tuan Guru* utilizes the democratic electoral system to expand his social and political influence. In his journey, *Tuan Guru* did what is called Sidel by maintaining his political dominance through the placement of relatives, and cronies as regional heads and members of the regional legislature in various political positions in NTB.

Purpose: This paper wants to discuss the role of *Tuan Guru* in the local political arena from the New Order era to the Reformation era in NTB.

Design/Methodology/Approach: This research is a descriptive qualitative research

Originality/Value: Similar research to this study is about the influence of *Tuan Guru* on political contestation in NTB. It's just that it doesn't discuss the shift in the role of *Tuan Guru* in political contestation, so this paper presents a novelty on the role of *Tuan Guru* in political contestation in NTB.

Keywords: Elite, Local Strongmen, *Tuan Guru*

Paper Type: Article-Research

¹ Penulis merupakan Peneliti Media di Indonesia Indicator | lavicaanky@gmail.com

Pendahuluan

Keruntuhan rezim Orde Baru setelah Soeharto berkuasa selama 32 tahun telah melahirkan proses demokratisasi dan desentralisasi sebagai bagian dari reformasi di Indonesia. Demokratisasi membuka kesempatan bagi warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk memilih pemimpin di tingkat lokal. Perpolitikan pada tingkat lokal, baik pada level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota menjadi penting sejak lahirnya UU No. 32 tahun 2004 (diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2014). Peraturan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar untuk daerah dalam melaksanakan pembangunannya, serta adanya proses demokratisasi berupa pilkada secara langsung yang mulai diadakan sejak tahun 2005 (Chalik 2017, 7).

Berlangsungnya desentralisasi justru dimanfaatkan elit di tingkat lokal untuk menguasai berbagai sumberdaya ekonomi maupun politik ketimbang aktor-aktor lainnya. Keterlibatan elit-elit lokal ini dapat dilihat pada penguasaan jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat. Nurhasim membagi menjadi dua perspektif yakni elit formal seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Sedangkan elit politik informal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit nonpolitik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Nurhasim, dkk 2003, 13).

Dari sisi inilah elit lokal dapat berkamuflase dan memiliki kedua unsur, baik sebagai elit politik formal dan informal yang disebut orang kuat lokal. Orang kuat lokal dalam eksistensinya selalu diidentikkan dengan kelebihan yang mereka miliki dan menimbulkan pengaruh tersendiri pada bidangnya (Minan 2014, 11). Migdal melihat fenomena di atas dapat dikatakan sebagai akibat bertahannya pengaruh orang kuat lokal di arena politik lokal. Kekuatan pengaruh dari orang kuat lokal bersumber dari

terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi orang kuat lokal bersama aparat birokrasi negara dan politisi. Orang kuat lokal berhasil menempatkan diri berada di antara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit dan pekerjaan. orang kuat lokal memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. Orang kuat lokal juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat (Migdal 2004, 88-93).

Fenomena munculnya orang kuat lokal memasuki era baru dengan adanya sistem desentralisasi yang melibatkan banyak aktor, institusi, dan budaya lokal yang mulai bermunculan kembali dan memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal terorganisir, dan memiliki simbol lokal yang dibawa ke panggung politik. Kehadiran sistem desentralisasi melalui otonomi daerah justru menciptakan arena atau babak baru dari kontestasi pertarungan dan perseteruan kekuatan politik untuk saling menguasai di ranah lokal, sehingga banyak bermunculan elit-elit di tingkat lokal yang memanfaatkan kesempatan untuk terus mengakumulasi dan mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya. Di samping itu juga, desentralisasi membuka peluang bagi para penguasa atau orang kuat lokal tumbuh dengan subur dan berkembang dengan cepat, serta memberikan warna dalam perpolitikan di berbagai daerah di Indonesia dan memanfaatkan peluang yang besar mengumpulkan kekayaan dan sumber daya yang ada (Nordholt dan Klinken 2007, 1).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin fenomena-fenomena yang dikaji. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2016, 4).

Kerangka Pemikiran

Local Strongmen

Local Strongmen atau orang kuat lokal adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya. Orang kuat lokal merupakan sebuah terminologi yang identik dengan elit, dan ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa (Nurhasim dkk 2003, 13). Sementara Joel Migdal memberikan definisi mengenai orang kuat lokal sebagai pemimpin nonformal negara seperti tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, *za'im*, *effendi*, *agha*, *cacique* dan *kulaks*, yang membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Para orang kuat lokal melakukan kontrol sosial terutama dilakukan untuk mengatur relasi sosial di dalam masyarakat, melakukan penetrasi di dalam masyarakat, mengambil sumber daya yang ada di dalam masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (Migdal 1998, 3-41).

Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan "strategi bertahan hidup". Dengan kondisi seperti itu, orang kuat dapat memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, serta juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah "personalisme", klientelisme, dan "hubungan patron klien". Orang kuat lokal juga menjadikan peran patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka (Harriss, Stokke, dan Tornquist 2004, 73). Hubungan patron-klien oleh James Scott diartikan sebagai hubungan antara satu pihak

dengan pihak lainya dengan status sosial tinggi (patron) dan kerap menggunakan pengaruh sumberdaya yang dimilikinya untuk melindungi untuk memberikan keuntungan untuk pihak lainnya (klien) yang dalam hal ini memberikan bantuan berupa dukungan hingga pengabdian kepada patronnya. Hubungan patronase ini banyak ditemukan di Asia Tenggara karena digunakan oleh sejumlah elite dan kelompok individu untuk mempertahankan atau memperoleh status, kekayaan hingga kekuasaan (Scott 1972, 104).

Dalam sebuah arena politik lokal, orang kuat lokal bersama birokrasi yang menjalankan kebijakan pemerintah dan politisi yang terdiri dari partai politik dan pemimpin formal di tingkat lokal, membentuk segitiga akomodasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mereka membangun apa yang disebut Joel Migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan politik. Orang kuat lokal melakukan tawar menawar dengan birokrat dan politisi yang menghasilkan kompromi atau kompetisi. Jika yang terjadi kompromi maka orang kuat lokal akan bekerjasama memenangkan partai politik tertentu dan kandidat tertentu. Setelah kemenangan diperoleh, para politisi memberikan banyak keuntungan kepada orang kuat lokal. Bahkan mereka menawarkan untuk dapat terlibat langsung memengaruhi keputusan penting mengenai alokasi sumber daya dan penerapan aturan-aturan kebijakan negara dengan cara menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri (Scott 1972). Para orang kuat lokal melakukan berbagai strategi untuk bisa bertahan hidup. Selain menggunakan partai politik, orang kuat lokal di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan mengeksploitasi politik etnis dan agama (Supriatma 2009).

Sementara pendapat Migdal mengenai teori orang kuat lokal mendapat catatan kritis dari John Sidel. Sidel menilai, pertama, sifat dasar negara dan sifat dasar masyarakat yang menyebabkan orang kuat lokal tumbuh dan berkembang. Kedua, kebangkitan orang kuat lokal dari dalam negara dan dari dalam masyarakat. Ketiga, struktur negara yang menciptakan kondisi bagi bangkit, bertahan dan berhasilnya orang kuat lokal. Keempat, budaya politik dan

tuntutan penduduk lokal yang partikular menyebabkan munculnya orang kuat lokal. Kelima, persediaan (*supply*) dari orang kuat lokal tidak selalu mencerminkan permintaan (*demand*) dari masyarakat. Keenam, orang kuat lokal tidak menghambat perkembangan kapitalisme dan justru memfasilitasi dan mengambil manfaat pertumbuhan industri dan perluasan pasar di daerah kekuasaan mereka. John Sidel memperingatkan bahwa “orang-orang kuat lokal” justru menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme (Sidel 1999, 53–57).

Sidel menambahkan bahwa orang kuat lokal melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut di antaranya: (1) Menempatkan kerabat dan kroni sebagai walikota, wakil walikota dan anggota legislatif daerah; (2) Membentuk mesin politik sebagai *broker* suara; (3) Mengatur penempatan pejabat daerah; (4) Mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi; (5) Mengatur peraturan daerah; (6) Mengatur keringanan pajak; (7) Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah; (8) Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan (Sidel 1999). Pada konteks Indonesia, orang kuat lokal dihambat kemunculannya selama Orde Baru karena sistem pemilihan tidak langsung. Namun, apabila dilakukan perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung maka orang kuat lokal dapat muncul dan berkembang di Indonesia. Selain itu, orang kuat lokal yang ada pada masa orde baru dan sekarang terdapat perbedaan yang mendasar sebab pada masa orde baru orang kuat lokal tidak berada pada lapisan struktur pemerintahan namun sekarang orang kuat lokal justru ikut dalam kontestasi politik. Kemunculan orang kuat lokal sebagai salah satu sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh pimpinannya sebagai tuan tanah atau orang kaya (Agustino 2010, 12).

Pembahasan dan Temuan

Fenomena orang kuat lokal juga terjadi pada NTB, tulisan ini hendak menganalisis peran tokoh agama yang disebut sebagai

Tuan Guru pada arena politik lokal di kawasan NTB. Tulisan ini berargumen bahwa proses desentralisasi menyebabkan terjadinya pergeseran dominasi elit lokal pada era reformasi di mana Tuan Guru menjadi aktor utama dalam kontestasi politik lokal di NTB. Hal ini menjadi menarik karena karena Tuan Guru telah melabarkan sayap untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh dari kalangan elit agama menjadi elit politik. Namun disatu sisi perluasan pengaruh politik ini membawa dampak negatif dengan memunculkan kasus politik kekerabatan dan dugaan korupsi.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, ulama menjadi salah satu entitas yang memiliki pengaruh besar dalam kontestasi sosial politik di Indonesia. Seorang akademisi dari Australia berpendapat bahwa pengaruh ini dibangun oleh para ulama dengan menyandarkan diri pada institusi yang berbasis pada pendidikan Islam yang bernama pesantren yang menempatkan diri ulama; Kyai di Jawa Timur dan Madura; Buya di Sumatera Barat; atau Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat, sebagai patron dengan modal pengetahuan agama. Lokasi pesantren yang berada pada kawasan pedesaan juga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara ulama, pesantren, dengan masyarakat sekitar. Modal pengetahuan dan posisi ulama sebagai figur tertinggi tertinggi di institusi pesantren tersebut, menempatkan para ulama sebagai sosok dengan ketokohan yang sentral, terutama di masyarakat berbasis Islam tradisional. Peranan ulama ini cukup strategis, ulama kerap dimanfaatkan sebagai mobilisator suara dengan memanfaatkan jejaring basis massa kultural di tingkatan pesantren. Hal ini juga berkaitan dengan pola partonase yang kuat di lingkungan pesantren di mana para santri akan mengikuti pilihan politik Kyai atau Ulama (Fealy 2011).

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 yang diikuti dengan proses demokratisasi justru memberi kesempatan politik bagi para ulama untuk merebut jabatan-jabatan politik baik di eksekutif maupun legislatif dari tingkat politik nasional hingga lokal. Dalam konteks politik nasional misalnya, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), putra dari ulama besar Nadhlatul Ulama (NU) yang juga Menteri Agama pada era kabinet pertama Indonesia, KH. Wahid Hasyim,

dan cucu dari pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari, berhasil menjadi Presiden keempat Republik Indonesia pada 1999 menggantikan BJ. Habibie. Dalam konteks politik lokal, pengaruh mereka yang signifikan di masyarakat membuat beberapa dari mereka mampu mengamankan posisi sebagai kepala daerah, terutama di daerah-daerah lumbung masyarakat Islam tradisional. Sebut saja KH Robbach Ma'sum (Bupati Gresik 2000-2005), KH. Kholilurrahman (Bupati Pamekasan 2008-2013), atau KH. Abuya Busyro Karim (Bupati Sumenep 2010-2015).

Di Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB), berhasil menjadi gubernur pada 2008. Dengan hanya disokong oleh dua partai kecil, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TGB yang merupakan cucu Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Pancor (TGP)-pendiri Nadhlatul Wathan, Organisasi Islam terbesar di NTB berhasil mengalahkan Gubernur petahana, Lalu Serinata. Padahal, Serinata diusung oleh Partai Golkar, yang merupakan partai berkuasa di Nusa Tenggara Barat dengan menguasai pemilu legislatif pada tahun 2004 dengan mengantongi 24,86% suara. Kemenangan TGB pada 2008 mencatatkan "rekor" sebagai gubernur termuda dan gubernur pertama yang berlatar organisasi Nahdlatul Wathan di NTB. Semenjak Tuan Guru Bajang menduduki kursi Gubernur NTB pada 2008, pengaruh para Tuan Guru, justru terlihat meningkat serta secara tidak langsung membuat pengaruh Tuan Guru dan organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan di NTB semakin meningkat. Hal ini terlihat pada Pilgub di 2013 di mana TGB berhasil kembali memenangkan pertarungan dengan memperoleh suara yang cukup signifikan, yakni 44,37%. Bahkan pada gelaran Pilpres 2014, dukungan TGB ke Prabowo-Hatta berdampak pada kemenangan mutlak hingga 72,45%. Dalam perkembangannya, pengaruh Tuan Guru ini justru menguasai jabatan struktural politik di Lombok baik di tingkatan legislatif dan eksekutif bahkan berkembang dengan memunculkan fenomena politik kekerabatan dan membangun basis ekonomi dalam jabatan politiknya.

Peran Tuan Guru Pada Ranah Politik Lokal di Era Orde Baru

Jauh sebelum memiliki peranan penting pada konteks sosial politik di era reformasi. Peran Tuan Guru pada masa Orba sebelumnya cukup penting meski hanya sebatas elit informal. Hal ini tidak terlepas dari struktur politik di era Orba. Kondisi sentralistik yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru berdampak pada tidak adanya kekuatan politik yang independen, kuatnya birokrasi dalam pengambilan keputusan, ekspansi dan keterlibatan pemerintah pusat dalam berbagai kekuatan sosial tidak terkecuali di NTB (Syamsuddin 2001, 65). Peranan Tuan Guru pada Orde Baru dapat dikatakan hanya sebatas “promotor pembangunan”, di mana berperan sebagai aktor penyampai program pemerintah. Menguatnya peran politik para Tuan Guru disebabkan ajakan rezim Soeharto untuk menjadi mobilisator massa pada pemilu 1971 karena peran sentral Tuan Guru dalam melakukan pemusnahan orang komunis di Lombok Timur pada era 1965-1966 (Kingsley 2012, 288). Dukungan Tuan Guru Pancor yakni Haji Abdul Madjid yang merupakan pendiri Nadhlatul Wathan pada Golkar saat pemilu 1971 dan 1977 dapat dikatakan sebagai bentuk jejaring sosial politik seperti apa yang disebut oleh Migdal. Hasilnya adalah kemenangan Golkar dan menjadikannya partai mayoritas dalam kedua pemilu tersebut. Kompensasinya adalah Tuan Guru Haji Abdul Madjid pun mewakili Nusa Tenggara Barat sebagai anggota MPR RI dari Golkar (MacDougall 2009, 379).

Hal ini sejalan dengan pendapat Migdal bahwa kompromi tersebut menghasilkan kompensasi politik di mana orang kuat lokal dapat terlibat langsung memengaruhi keputusan penting mengenai alokasi sumber daya dan penerapan aturan-aturan kebijakan negara dengan cara menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri. Dalam hal ini posisi penting di parlemen akan menaikkan posisi tawar Tuan Guru beserta organisasinya karena memiliki akses sumberdaya yang cukup luas. Tuan Guru menukar kepentingannya dengan melakukan mobilitas massa melalui relasi patron klien antara Tuan Guru dengan Santri dan masyarakat. Praktis para politisi

memanfaatkan jejaring patron-kliennya untuk mendulang massa demi kepentingan politik Soeharto. Hal ini berkaitan dengan posisi Tuan Guru yang menjadi figur sentral di masyarakat Lombok karena pengaruh yang cukup luas yang berkaitan dengan status pemimpin agama yang berpengaruh luas terhadap sosial-politik (Kingsley 2012, 288).

Adapun kompromi politik ini juga berkaitan dengan kepentingan politik para Tuan Guru untuk menyebarkan pengaruh di Lombok. John M. MacDougall mengatakan dukungan tersebut sebagai ucapan terima kasih Tuan Guru kepada Soeharto atas perannya menumpas PKI. Di samping itu, pihak militer dan pejabat pemerintah memberikan bantuan kepada Tuan Guru dalam mendakwahkan komunitas Wetu Telu. Karena Wetu Telu dianggap membahayakan Islam dikarenakan ritualisme mereka yang unik, merupakan kombinasi ritualisme Sasak (MacDougall 2009, 379). Seperti kita ketahui polarisasi beragama di Lombok terbagi menjadi dua kelompok, yakni Wetu Telu dan Waktu lima. Islam Wetu Telu tidak menggariskan suatu batas yang jelas antara adat dan agama, karena adat sangat bercampur-aduk dengan agama lokal (agama Boda), penganut Wetu Telu ini tersebar pada wilayah terpencil di Lombok Utara (Budiwati 2005, 7-8). Sementara waktu lima ini sebagaimana Islam secara umum dengan ajaran sesuai syariat Alquran dan Nahdlatul Wathan berperan menyebarluaskan melalui dakwah dan pendidikan mengenai syariat Islam di seantero Lombok.

Peran Tuan Guru Pada Ranah Politik Lokal di Era Reformasi

Berakhirnya Orde Baru yang membawa liberalisasi politik menjadikan peran Tuan Guru pada kontestasi politik lokal menjadi luas. Desentralisasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi proses demokratisasi di daerah. Selain proses demokratisasi, proses pemilihan langsung oleh masyarakat memunculkan fenomena baru di mana ada pergeseran elit lokal. Pergeseran politik ini muncul saat masuknya Tuan Guru ke ranah politik praktis menjadi gubernur, bupati, anggota legislatif baik tingkatan lokal maupun pusat. Tuan Guru mengalami transformasi luar biasa dengan menjadi menjadi aktor utama dalam pemilu dan

bukan menjadi aktor di luar kontestasi dengan menjadi mobilisator massa untuk mengajak memilih calon-calon tertentu.

Posisi Tuan Guru yang menjadi aktor politik pada era reformasi tidak terlepas pada pemanfaatan simbol kultural keagamaan karena peran sentral dirinya sebagai pemimpin keagamaan di lingkungan pesantren yang menjadikan dirinya memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Tuan Guru memiliki kekuasaan berdasarkan kharisma dan tradisi, sehingga kekuatan politiknya lebih banyak di sektor informal. Seorang elit informal mendapatkannya melalui pengakuan dari masyarakat bukan prosedur pemilihan atau legal-formal. Biasanya elit informal ini memiliki karisma yang dipercaya oleh masyarakat bahwa kekuasaan yang dimiliki sah adanya (Kingsley 2012, 65). Meminjam istilah Bourdieu, apa yang dilakukan oleh Tuan Guru ini memanfaatkan modal sosial di mana Tuan Guru mampu membangun relasi dengan masyarakat melalui lembaga keagamaan Nahdlatul Wathan menjadi modal politik untuk dikonversikan pada suara pada pemilu (Hamdi 2014, 7).

Kuatnya ikatan sosial di tengah masyarakat didukung infrastruktur kelembagaan yang luas di seantero NTB. Hal inilah yang menghasilkan mekanisme yang kuat untuk sebuah kesetiaan dengan sumber patronase. Jaringan organisasinya (Nahdlatul Wathan) tersebar luas termasuk pesantren, penyediaan layanan sosial seperti klinik medis, dan bisnis termasuk toko, layanan katering, dan membukan BPD sebagai bentuk mekanisme “simpan pinjam” dengan masyarakat. Kegiatan spiritual dan sosial ini telah memperkuat peran Tuan Guru, dan dapat dikatakan bahwa jaringan kelembagaan yang mereka ciptakan mirip dengan sebuah negara, karena kegiatan organisasi keagamaan mereka mereplikasi banyak fungsi negara melakukan pelayanan termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Kingsley 2012, 65). Meminjam istilah Migdal, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Guru ini adalah sebuah kontrol sosial yang dilakukan untuk mengatur relasi sosial di dalam masyarakat, melakukan penetrasi di dalam masyarakat, mengambil sumber daya yang ada di dalam masyarakat dan

menggunakan sumber daya yang ada di dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya (Sidel 1999, 53–57).

Salah satu yang menjadi ciri keberhasilan Tuan Guru pada ranah politik lokal era Reformasi adalah terpilihnya Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau kerap disebut Tuan Guru Bajang (TGB) pada Pemilu 2008. Serta kemenangan Tuan Guru Najmu Akhyar yang mencalonkan diri menjadi calon Bupati di Pemilu 2015. Keberhasilan Tuan Guru Bajang ini tidak terlepas pada posisi sentral dirinya sebagai pemimpin tertinggi Nahdlatul Wathan selepas meninggalnya Tuan Guru Pancor pada 1997. Meskipun dalam perjalanan sejarah organisasi Nahdlatul Wathan sendiri mengalami perpecahan yakni kubu Pancor dan Anjani. Menariknya, perpecahan organisasi Nahdlatul Wathan menyebabkan kedua kubu saling bersaing dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Dalam kurun waktu 12 tahun dihitung dari awal konflik keduanya yakni 1997, lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan telah berkembang hingga mencapai 900 buah yang tersebar di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, meningkat hampir setengah dari lembaga pendidikan yang diciptakan oleh Tuan Guru Pancor (Muhtar 2010). Jika dilihat dari sisi pengaruh, perkembangan jumlah madrasah Nahdlatul Wathan secara signifikan ini justru berimplikasi positif terhadap semakin menguatnya pengaruh Tuan Guru selaku patron dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Hal tersebut tentu menjadi modal signifikan bagi keturunan Tuan Guru Pancor ketika diakumulasi untuk memenangkan sebuah pertarungan politik (Oktara 2015, 73–82). Hasilnya adalah TGB memenangkan kontestasi dengan 847.976 suara

Kemenangan Tuan Guru Bajang pada Pilkada 2008 menandai dimulainya pergeseran Tuan Guru dari elit informal menjadi elit formal yang mengisi jabatan publik berupa Gubernur NTB. Bahkan pengaruh Tuan Guru di kancah perpolitikan semakin meluas dengan masuknya sejumlah Tuan Guru lain dalam kompetisi politik lokal baik pada tingkatan legislatif maupun eksekutif. Di antaranya adalah Najmul Akhyar adalah seorang Bupati Lombok Utara yang terpilih pada Pilkada tahun 2015. Najmul Akhyar

memenangkan kontestasi dengan memperoleh suara 68.326 suara atau 53,50%, sedangkan rivalnya mendapatkan 59.511 suara atau 46,50%. Kemenangan ini membuktikan bahwa sekali lagi pengaruh satu figur sebagai Tuan Guru dan menjadi pimpinan pondok pesantren menjadi sumber modal, baik itu sosial atau pun politik. Hal ini menjadi legitimasi politik bahwa seorang tokoh agamawan terutama dari Nahdlatul Wathan akan memenangkan kontestasi (Oktara 2015).

Peran politik Tuan Guru di era Reformasi justru membuktikan argumentasi dari Sidel bahwa orang kuat lokal akan menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme berakhir. Kemunculan mereka dihambat oleh sistem politik yang sentralistik dan otoritarian pada era Orba. Di satu sisi, luasnya peran Tuan Guru memunculkan indikasi negatif berupa munculnya politik kekerabatan dan persaingan antar Tuan Guru. Hal ini dapat ditinjau dalam pelaksanaan Pilgub NTB 2018 di mana TGB memberikan dukungan pada paslon Zulkifliemansyah-Sitti Rohmi Djalilah. Sitti Rohmi Djalilah sendiri merupakan kakak kandung dari Tuan Guru Bajang (Sani 2018).

Hal ini sejalan dengan pendapat Sidel mengenai orang kuat lokal atau yang familiar dengan *bossism* memanfaatkan sistem pemilihan langsung untuk mempertahankan dominasi politiknya. Strategi yang dilakukan adalah menempatkan kerabat dan kroni sebagai kepala daerah dan anggota legislatif daerah (Sidel 1997). Apa yang dilakukan ini bukan semata untuk penguasaan ekonomi melainkan memperluas pengaruh dengan mengisi posisi strategis pemerintahan. Sehingga dengan mengisi posisi politik berupa kepala daerah maka legitimasi Tuan Guru akan tetap terjaga dan dapat mendapatkan penguasaan akses sumberdaya ekonomi secara luas. Hal ini terbukti ketika Tuan Guru Bajang menjabat Gubernur, dirinya diterpa isu dugaan korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara. TGB diduga menerima aliran dana divestasi periode 2009-2013 sebesar Rp7,36 miliar (Aji 2018). TGB saat menjabat Gubernur NTB melakukan apa yang disebut Sidel sebagai upaya

memfasilitasi dan mengambil manfaat pertumbuhan industri dan perluasan pasar di daerah kekuasaan mereka. Maka kehadiran TGB sebagai orang kuat lokal tidak menghambat adanya perkembangan kapitalisme. Justru memanfaatkan mereka untuk kepentingan membangun basis ekonomi yang kuat dengan cara korupsi politik (Sidel 1997).

Kesimpulan

Fenomena orang kuat lokal tidak hanya berlatar dari figur-figur elit formal seperti pada pejabat politik yang berada di dalam struktur politik pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, Anggota DPRD. Peran orang kuat lokal ini bisa hadir dari lingkungan keagamaan yang tidak memiliki basis sumberdaya ekonomi yang luas. Namun dari basis sumberdaya sosial berupa lembaga keagamaan pesantren. Modal sosial berupa pengaruh yang kuat karena legitimasi publik sebagai pemimpin agama dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Pada era Orde Baru, peranan Tuan guru ini hanya sebatas sebagai mobilisator politik dengan mendukung partai Golkar dan digunakan untuk barter kepentingan dengan dukungan rezim untuk perluasan pengaruh lembaga keagamaan melalui dakwah. Sementara hadirnya demokratisasi pada era Reformasi membuktikan bahwa dengan modal sosial jaringan para santri dan sebagai tokoh masyarakat, para Tuan Guru dapat bertransformasi dari elit informal menuju elit formal melalui sistem pemilu terbuka. Perluasan kewenangan ini juga sejalan dengan perluasan pengaruh di bidang politik dan ekonomi yang justru menjadi catatan buruk proses demokratisasi. Tercatat Tuan Guru melalui TGB melakukan adanya politik kekerabatan melalui dukungan terhadap keluarganya Sitti Rohmi Djalilah sebagai suksesor di jabatan politik di NTB. Di satu sisi jabatan politik ini digunakan untuk perluasan basis ekonomi, hal ini terlihat pada menguatnya kasus dugaan TGB menerima aliran dana divestasi Newmont periode 2009-2013 sebesar Rp7,36 M.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2010. "Politik Lokal Di Indonesia Dari Otokritik Ke Reformasi Politik." *Jurnal Ilmu Politik* 21.

- Aji, M. Rosseno. 2018. "TGB Diduga Terima Gratifikasi, Ini Duit Keluar-Masuk Rekeningnya." *Tempo*. 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1127273/tgb-diduga-terima-gratifikasi-ini-duit-keluar-masuk-rekeningnya>.
- Budiwati, Erni. 2005. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima*. Yogyakarta: LKiS.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fealy, Greg. 2011. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952- 1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamdi, Saipul. 2014. *Nahdlatul Wathan Di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunis Dan Peta Rekonsiliasi*. Yogyakarta: KSS Yogyakarta.
- Harriss, John, Kristian Stokke, and Olle Tornquist. 2004. *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Kingsley, Jeremy J. 2012. "Village Election, Violence and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia." *Sojourn* 27 (2).
- MacDougall, John M. 2009. "Kriminalitas Dan Ekonomi Politik Keamanan Di Lombok." In *Politik Lokal Di Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Migdal, Joel S. 1998. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- — —. 2004. *State in Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Minan, Khoirul. 2014. *Sinergi Local Strongmen: Pengusaha Dan Tokoh Agama Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Demak*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Muhtar, Fathurrahman. 2010. "Konflik Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Nordholt, Henk Schulte, and Gerry van Klinken. 2007. *Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhasim, Moch, and Dkk. 2003. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian LIPI.
- Oktara, Arie. 2015. "Politik Tuan Guru Di Nusa Tenggara Barat." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8 (2).
- Sani, Ahmad Faiz Ibnu. 2018. "Dilantik Jadi Wagub NTB, Kakak Kandung TGB Dukung Jokowi." *Tempo*. 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1127966/dilantik-jadi-wagub-ntb-kakak-kandung-tgb-dukung-jokowi>.
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review* 66 (1).
- Sidel, John T. 1997. "Philippine Politics in Town, District and Province: Bossism in Cavite and Cebu." *The Journal of Asian Studies* 56 (4).
- — —. 1999. *Capital, Coercion and Crime: Bossism in the Philippines*. Stanford: Stanford University Press.
- Supriatma, Antonius Made. 2009. "Menguatnya Kartel Politik Para Bos." *Prisma* 28 (2).
- Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam Dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.